

“POLITIK *BHINNEKA TUNGGAL IKA*” UNTUK MENGELOLA MASYARAKAT INDONESIA YANG MULTIKULTURAL

Dikdik Baehaqi Arif

Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Pramuka No. 42, Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161
e-mail: dik2baehaqi@yahoo.com

ABSTRAK: Transformasi masyarakat majemuk Indonesia (*plural society*) menuju masyarakat multikultural (*multicultural society*) meniscayakan sebuah pemahaman yang menekankan pada pentingnya kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat, serta semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan budaya yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat. Realitas masyarakat Indonesia yang multikultural dapat dimaknai sebagai modal sosial dan modal budaya berupa beragam adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu, disamping juga berpotensi melahirkan konflik-konflik antarkelompok masyarakat yang berbeda budaya itu. Pada gilirannya, konflik-konflik itu akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*). Politik *Bhinneka Tunggal Ika* dapat dijadikan acuan dalam mengelola masyarakat Indonesia multikultural yang sarat dengan konflik itu. Sebagai semboyan negara yang berasal dari Kakawin Sutasoma, politik *Bhinneka Tunggal Ika* memberikan tempat yang pantas pada keanekaragaman, memberi peluang dan akses yang sama kepada setiap warga bangsa untuk mengokohkan bangunan politik yang bernama NKRI, memberdayakan seluruh warga bangsa agar merasa menjadi bagian penting dari NKRI dan merasa memiliki cita-cita dan tujuan yang sama.

Kata kunci: *bhinneka tunggal ika*, multikulturalisme, pluralisme, masyarakat, konflik

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakatnya yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang sangat kompleks. Clifford Geertz (1996) (Hardiman, 2002:4) mengakui sulit melukiskan anatomi Indonesia secara persis. Negara ini, bukan saja multietnis (seperti Dayak, Kutai, Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), tetapi juga menjadi medan pertarungan pengaruh multimental dan ideologi (seperti India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Budhisme, Konfusianisme,

Islam, Kristen, Kapitalisme, dan seterusnya). Geertz melukiskan Indonesia sebagai sejumlah ‘bangsa’ dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.

Secara empirik, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk. Dalam kajian Furnival (1948) (Hefner, 2007:16; Nasikun, 2007:33) masyarakat majemuk (*plural society*) adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur dalam satu unit politik yang tunggal. Bahkan Hefner (2007:16) memperkuat pernyataan Furnival di atas dengan menggambarkan tantangan pluralisme budaya yang dimiliki Indonesia secara lebih mencolok dan dianggap sebagai lokus klasik bagi bentukan masyarakat majemuk.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk itu, ada dua istilah yang penting dipahami yaitu kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas). Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, dan bukan ketunggalan (Kusumohamidjojo, 2000:45). Artinya, dalam “masyarakat Indonesia” dapat dijumpai berbagai subkelompok masyarakat yang tidak bisa disatukelompokkan satu dengan yang lainnya. Adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu. Demikian pula halnya dengan kebudayaan mereka. Sementara heterogenitas yang merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya (Kusumohamidjojo, 2000:45). Artinya, masing-masing subkelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya bisa sungguh-sungguh berbeda satu dari yang lainnya. Dalam tulisan ini, pluralitas dan heterogenitas akan dipakai secara bergantian sebagai kebhinnekaan dan multikultural.

Realitas kebhinnekaan Indonesia dilukiskan Kusumohamidjojo (2000:16) dalam dua dimensi, geografis dan etnografis. *Pertama*, dimensi geografis sebagaimana hasil pengamatan dari Alfred Wallace dan Weber yang kemudian

dikukuhkan dalam Geografi sebagai Garis Wallacea yang membentang dari Laut Sulu di utara melalui selat Makasar hingga ke Selat Lombok di selatan, dan Garis Weber yang membentang dari pantai barat Pulau Halmahera di utara melalui Laut Seram hingga ke Laut Timor di selatan. Garis Wallacea dan Weber secara fisiko-geografis membedakan Dangkalan Sunda di sebelah Barat (yang meliputi pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali) dari Dangkalan Indonesia Tengah (yang meliputi pulau-pulau Sulawesi dan sebagian pulau-pulau Nusa Tenggara sebelah Barat), dan dari Dangkalan Sahul di sebelah timur (yang meliputi kepulauan Halmahera, Aru dan Papua). Perbedaan itu merupakan akibat dari proses perkembangan fisiko-geografis yang ditinggalkan oleh akhir Zaman Es. Perbedaan geografis itu berakibat menentukan pada perbedaan dunia flora dan fauna dari masing-masing kelompok kepulauan itu.

Dimensi *kedua* adalah dimensi yang etnografis, yang merupakan perpaduan konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan proses migrasi bangsa-bangsa purba. Dalam kerangka dimensi etnografis itu kita dapat melihat adanya perbedaan etnis pada penduduk yang mendiami berbagai pulau-pulau Nusantara. Dari hasil penelitian yang dilakukan seorang antropolog Junus Melalatoa (1995) yang kemudian hasil penelitian ini diterbitkan sebagai *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Depdikbud, 1995) diketahui adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah negara yang kita sepakati bersama-sama bernama Indonesia ini, mereka mendiami sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, berpenghuni atau tidak berpenghuni. Karakteristik kebhinnekaan masyarakat Indonesia itu nampak dalam tabel berikut:

Tabel 1 Karakteristik Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia

	Dangkalan Sunda (Indonesia Barat)	Dangkalan Indonesia Tengah	Dangkalan Sahul (Indonesia Timur)
Geografis	<ul style="list-style-type: none"> • Sumatera • Kalimantan • Jawa • Bali 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulawesi • Sebagian pulau-pulau Nusa Tenggara sebelah Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepulauan Halmahera • Aru • Papua
Etnografis	<ul style="list-style-type: none"> • Aceh • Padang • Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> • Makasar • Bugis • Luwu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dani • Asmat • Biak

<ul style="list-style-type: none"> • Sunda • Madura • Bali • Banjar • dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toraja • Butung • Gorontalo • Manado • dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Serui • Sentani • Waropen • Guai • dll.
---	---	---

Sumber: Arif, 2008

Kebhinnekaan yang ada di Indonesia sebenarnya sudah *taken for granted*, kebhinnekaan ini bukan karena hadirnya para pendatang baru yang berlainan etnik, ras atau agama, melainkan karena sejak dulu masyarakat Indonesia memang plural sekaligus heterogen. Dalam perspektif lain, kebhinnekaan bangsa Indonesia dapat dilihat baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, kebhinnekaan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. Sedangkan secara horizontal, kebhinnekaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan budayanya.

Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan sekaligus heterogen, tersimpan kekuatan yang sangat besar (sebagai modal sosial dan budaya) berupa beragam adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajahan. Sifat kebhinnekaan Indonesia justru lebih memperkuat keinginan untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Oleh karena itu kebhinnekaan masyarakat Indonesia perlu dilihat sebagai sesuatu yang cair dengan tujuan adil, makmur dan bermartabat bagi tiap warga negara. Cair dalam arti bahwa ada kebutuhan situasional dan konstekstual yang perlu diperbaharui dan/atau direvisi dari waktu ke waktu atau perubahan waktu (Arif, 2008).

Hal di atas relevan dengan pernyataan Benedict Anderson dalam *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1983) yang dengan tepat melihat kekuatan pengikat tersebut sebagai adanya suatu keinginan untuk membentuk komunitas-komunitas terbayang (*imagined communities*). Dikatakan sebagai *imagined communities* karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan tidak kenal sebagian besar anggota lainnya, tidak

akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Semuanya menjadi konsep komunitas politik ketika ditiupkan konsep sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka yang pada saat yang sama komunitas itu berubah menjadi sesuatu yang terbayang berada dalam bangunan bayang-bayang citra sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada dalam batas-batas kesamaan itu (Dhakidae, 2002). Dalam arti itu, bangsa Indonesia adalah proyeksi ke depan dan sekaligus ke belakang. Karena itu tidak pernah dikatakan bangsa itu “lahir” melainkan ia “hadir” dalam formasi sebagai suatu *historical being* sebagaimana dikatakan komunitas-komunitas terbayang yang didasarkan pada berbagai faktor bahasa, etnisitas, adat-istiadat, memori dan sejarah orang-orang yang tinggal di kepulauan Nusantara yang beranekaragam.

Selain memberikan *side effect* (dampak) positif sebagaimana diuraikan di atas, dalam masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen, tersimpan dampak negatif, sebab karena faktor kebhinnekaan itulah justru sering memicu timbulnya konflik antarkelompok masyarakat. Konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*).

Tabel 2 Sisi Positif dan Negatif Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia

Unsur Kebhinnekaan	Sisi positif	Sisi negatif
<ul style="list-style-type: none"> • etnik, • budaya, • agama dan kepercayaan, • bahasa, • dll 	<ul style="list-style-type: none"> • pengikat kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajah • sifat kebhinnekaan memperkuat keinginan untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • memicu timbulnya konflik antarkelompok masyarakat • distabilitas keamanan, • distabilitas sosio-ekonomi • ketidakharmonisan sosial (<i>social disharmony</i>)

Sumber: Arif, 2008

Realitas masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen dapat diilustrasikan sebagai sebuah mozaik dimana keutuhan dan keserasiannya ditopang oleh perbedaan unsur-unsurnya yang berasal dari keanekaragaman yang

ada dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dibentuk dari pertemuan berbagai macam warna dari kelompok masyarakat pendukungnya.

Dari Pluralisme ke Multikulturalisme

Salah satu agenda reformasi masyarakat Indonesia ialah menegakkan suatu hidup bersama yang demokratis, mengakui akan martabat manusia yang sama (*human dignity*), menghormati akan keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, dan bertekad untuk membangun kesatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia baru itu adalah masyarakat multikultural (*multicultural society*) Indonesia yang semakin meneguhkan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai upaya untuk membangun integrasi dan demokrasi Indonesia (Arif, 2008).

Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern, bukan sebagai *monocultural nation-state*. Hal itu dapat dicermati dari dinamika praksis kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap zamannya itu. Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yang secara substantif dan prosedural menghargai persamaan dalam perbedaan dan persatuan dalam keberagaman, secara konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut.

Konsep masyarakat multikultural (*multicultural society*) perlu dibedakan dengan konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98). Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006:154, Suparlan

2005). Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Tabel 3 Transformasi Masyarakat Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*

Masyarakat Majemuk (plural society)		Masyarakat Multikultural (multicultural society)
terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur dalam satu unit politik yang tunggal.		sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.

Sumber: Arif, 2008

Perubahan cara berpikir pluralisme ke multikulturalisme adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep multikulturalisme yang sesuai dengan konteks Indonesia, dan pemahaman itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung.

Masyarakat baru yang merupakan pergeseran dari masyarakat majemuk ke masyarakat multikultural Indonesia yang dicita-citakan adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang mengatur kehidupannya sebagai warga suatu bangsa. Sebagai dasar kehidupan bernegara, Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara.

Pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa diakui bahwa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan sumber etika dan moral. Manusia Indonesia yang bermoral adalah manusia yang menjalankan nilai-nilai agama yang dianutnya. Di dalam sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi dan HAM. Seorang manusia Indonesia hanyalah mempunyai arti di dalam kehidupan bersama manusia Indonesia lainnya untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan.

Hal ini berarti manusia dan masyarakat Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang humanis dan mengakui akan hak asasi manusia. Di dalam sila kelima Pancasila, yang penting ialah penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno di dalam salah satu pidatonya. Di dalam sila keempat mengandung nilai-nilai demokrasi dan pandangan populis. Kehidupan bersama masyarakat Indonesia berpihak kepada kepentingan rakyat dan bukan kepada kepentingan penguasa atau kepada segolongan masyarakat yang *better off*. Di dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno merupakan alat dan bukan tujuan di dalam kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu berbagai kebijakan yang memaksa menghilangkan kebhinnekaan masyarakat Indonesia adalah bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia.

Politik *Bhinneka Tunggal Ika*

Para pendiri negara (*founding fathers*) yang memahami betul konstelasi masyarakat Indonesia yang plural dan sekaligus juga heterogen telah menjadikan ujar-ujar *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan bagi Negara Republik Indonesia (Kusumohamidjojo, 2000:1, 45), bahkan setelah proses perubahan UUD 1945, ujar-ujar *Bhinneka Tunggal Ika* itu semakin dikukuhkan sebagai semboyan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi *Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika***. Semboyan ini memuat idealitas multikulturalisme di Indonesia (Hardiman, 2005:xiv).

Sebagai suatu *historical being*, *Bhinneka Tunggal Ika* yang secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu atau *although in pieces yet one*, melewati rentang yang panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mulai pada zaman negara kerajaan Nusantara. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara, yang diikrarkan oleh Patih Gadjah Mada dalam Kakawin Sutasoma, karya Empu Tantular:

*Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa,
bhinnēki rakwa ring apan kēna parwanosēn,
mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
bhinnēka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa* (Pupuh 139: 5).

(Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. (*Bhineka Tunggal ika tan Hana Dharma Mangrwa*) (Tantular, 2009:504-505)

Tentang hal ini amatlah menarik menyimak apa yang dikemukakan oleh Supardan (2008:135) yang mengutip uraian Darmodihardjo (1985), yang menyatakan bahwa *Bhinneka Tunggal Ika* secara hakiki mengungkapkan kebenaran historis yang tidak dapat disangkal lagi sejak zaman kerajaan dahulu. Kerajaan Majapahit memiliki politik hubungan antarkerajaan yang terungkap dalam semboyan “*mitreka satata*” yang berarti “persahabatan dengan dasar saling menghormati” dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara lainnya seperti Champa, Syam, Burma. Pujangga Empu Tantular melukiskan kehidupan beragama dengan baik dengan kalimat “*bhinneka tunggal ika tan hana darma mangrua*” yang berarti “walaupun berbeda, satu adanya, tidak ada agama yang tujuannya berbeda”. Empu Tantular sudah mendudukan ujar-ujar tersebut sebagai falsafah Kerajaan Majapahit pada zamannya (abad ke-14).

Uraian di atas memperjelas pernyataan Gonggong (2000) yang menyatakan perkembangan masyarakat yang kini menyebut dirinya dengan Indonesia itu melalui suatu jarak waktu yang panjang, yaitu dimulai ketika masyarakat itu masih bertegak dan hidup dalam “negara” atau kerajaan-kerajaan Nusantara. Atau gambaran yang diberikan oleh Clifford Geertz (2000), antropolog kondang yang dianggap sebagai ahli Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Gonggong (2000:x) berikut:

Ketika kita menyaksikan panorama Indonesia saat ini, rasanya kita sedang menyusun suatu sinopsis masa lalu yang tanpa batas, seperti kalau kita melihat benda-benda peninggalan sejarah (artefak) dari bermacam-macam lapisan dalam situs arkeologis yang lama mengeram, yang diajarkan di

atas sebuah meja sehingga sekali pandang bisa kita lihat kilasan sejarah manusia sepanjang ribuan tahun. Semua arus kultural yang sepanjang tiga millennia, mengalir berurutan, memasuki Nusantara dari India, dari Cina, dari Timur Tengah, dari Eropa – terwakili di tempat-tempat tertentu: di Bali yang Hindu, di permukiman Cina di Jakarta, Semarang atau Surabaya, di pusat-pusat Muslim di Aceh, Makasar atau Dataran Tinggi Padang; di daerah-daerah Minahasa dan Ambon yang Calvinis, atau daerah-daerah Flores dan Timor yang Katolik.

Lebih lanjut, Geertz (Gonggong, 2000:x) menunjukkan fakta tentang situasi masyarakat Indonesia, sebagai berikut:

Rentang struktur sosialnya juga lebar, dan merangkum: sistem-sistem kekuasaan Melayu-Polynesia di pedalaman Kalimantan atau Sulawesi, desa-desa tradisional di dataran rendah di sepanjang sungai Jawa Tengah dan Jawa Timur; desa-desa nelayan dan penyelundupan yang berorientasi pasar di pantai-pantai Kalimantan dan Sulawesi; ibu-ibu kota provinsi yang kumuh dan kota-kota kecil di Jawa dan pulau-pulau seberang; dan kota-kota metropolitan yang besar, terasing, dan setengah modern seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan Makasar. Keanekaragaman bentuk perekonomian sistem-sistem stratifikasi, atau aturan kekerabatan juga melimpah ruah.

Apa yang diterangkan di atas barulah hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang dilatari oleh perjalanan sejarah yang panjang. Dilihat dari segi agama, keyakinan, budaya, dan suku bangsa, Indonesia adalah satu contoh negara yang paling beragam. Dalam masyarakat yang plural dan heterogen ini, konsep *Bhinneka Tunggal Ika* mensyaratkan *united and unified diversities*, tetapi tidak mungkin memberi tempat kepada *uniformed diversities*. Namun demikian, masalahnya adalah, pemenuhan syarat itu memprasyaratkan kemauan politik (*political will*) untuk memahami implikasi dari *Bhinneka Tunggal Ika* itu dalam konteks kebudayaan yang menjadi semakin canggih dalam suatu proses sosial yang kompleks. Kebhinnekaan dalam masyarakat, apalagi yang semakin melebar sebagai akibat dari industrialisasi dan informatisasi akan semakin melonggarkan ikatan-ikatan kekeluargaan, ruang hidup, asal usul sosial dan tradisi, untuk pada gilirannya kemudian menggulirkan perubahan struktur dalam keutuhan masyarakat. Meskipun demikian, kita tidak mempunyai pilihan lain. Dengan Proklamasi yang mendirikan Republik Indonesia kita sudah menyatakan diri

sebagai suatu bangsa, bahkan sebagai bangsa yang besar. Dengan demikian, tantangan bagi masyarakat Indonesia adalah untuk membuktikan, bahwa kita sungguh-sungguh merupakan bangsa yang besar. Kegagalan untuk membuktikannya hanya akan membuat mimpi buruk disintegrasi menjadi kenyataan yang sukar untuk dipikul.

Semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman sebagai cita-cita terbayangkan bangsa Indonesia dalam perjalanannya tidak selalu menunjukkan kesesuaian antara wacana dan praktik. Pada tataran praksis masih terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara negara. Memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang bersifat multikultural itu sampai saat ini masih belum mencapai tarap yang membanggakan dan membahagiakan. Misalnya, kita masih menyaksikan berkembangnya fenomena kasuistis dari etnosentrisme dan primordialisme lain yang menyertai desentralisasi dan otonomi daerah, yang diwarnai konflik horizontal antar suku, agama, ras dan golongan yang terjadi di berbagai penjuru tanah air, terutama pada saat terjadinya proses politik pemilihan umum.

Pengalaman sejarah bangsa telah menunjukkan bahwa sejak masa Orde Lama dan Orde Baru, terdapat kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik keseragaman budaya (*monokulturalisme*) yang pada gilirannya justru menghancurkan budaya lokal yang asli (*local cultural genius*). Padahal tradisi sosio-kultural lokal itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri tetapi bagi masyarakat-masyarakat lain. Tradisi lokal ini juga merupakan *defense mechanism* dan sekaligus *early warning system* yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan.

Sebagai contoh, politik penyeragaman tergambar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang selama ini bercorak “monokulturalisme”, serba penyeragaman demi stabilitas dan integrasi bangsa. Pemaksaan ini menjadi bagian dari pemicu munculnya berbagai konflik sosial di beberapa daerah yang sekaligus

telah menegaskan semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang disinyalir akibat masyarakat tercerabut dari nilai-nilai lokal mereka yang genuin.

Oleh karena itu, mengingat kenyataan kebhinnekaan Indonesia, negara ini hanya bisa bertahan dalam persatuan jika segenap warga dan pemerintahnya memberikan tempat yang pantas pada keanekaragaman tersebut sambil menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang menghormati kemandirian daerah tetapi juga mengedepankan solidaritas untuk memajukan daerah-daerah yang kurang beruntung dalam sumber daya alam dan kelompok-kelompok masyarakat yang terasing jauh dari pusat maupun jalur pembuatan keputusan politik maupun lalu lintas transportasi dan komunikasi.

Untuk menghadapi realitas kebhinnekaan tersebut, diperlukan politik *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu politik pembelaan bagi seluruh warga bangsa yang terkait dengan hak-hak mereka untuk berbudaya, beragama, dan berpolitik agar setiap warga merasa mantap dan nyaman menjadi bagian dari bangsa Indonesia (Sutarto, 2011:50). Politik *Bhinneka Tunggal Ika* adalah politik penguatan berbagai elemen bangsa yang berlatar belakang etnik, budaya, agama, dan golongan yang berbeda, yang bertujuan untuk meneguhkan NKRI. Politik *Bhinneka Tunggal Ika* memberi peluang dan akses yang sama kepada setiap warga bangsa, tidak pandang latar belakang etnik, agama, ras, dan golongan, asalkan yang bersangkutan memiliki komitmen untuk mengokohkan bangunan politik yang bernama NKRI. Politik *Bhinneka Tunggal Ika* adalah politik pemberdayaan seluruh warga bangsa, agar mereka merasa menjadi bagian penting dari NKRI dan merasa memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Politik *Bhinneka Tunggal Ika* adalah pemanfaatan secara strategis produk-produk budaya Indonesia, baik yang *tangibles* “bendawi” maupun *intangibles* “nonbendawi” untuk mengatasi berbagai masalah yang membelit bangsa, baik masalah yang bernuansa politis, ekonomi, maupun kebudayaan.

Dalam konteks pendidikan, politik *Bhinneka Tunggal Ika* dapat dibelajarkan kepada setiap peserta didik guna mengarahkan mereka untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Politik *Bhinneka*

Tunggal Ika ini lebih luas dimaksudkan bahwa kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. Dengan pandangan tersebut, diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri (*truth claim*) dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Penutup

Kebhinnekaan Indonesia sebagaimana tergambar dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* perlu dipahami sebagai *imagined community* (komunitas-komunitas terbayang) bertujuan membangun solidaritas yang positif, baik pada level nasional atau level yang lebih kecil. Sebagai komunitas terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak akan tahu dan tidak kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Semuanya menjadi konsep komunitas politik ketika ditiupkan konsep sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka yang pada saat yang sama komunitas itu berubah menjadi sesuatu yang terbayang berada dalam bangunan bayang-bayang citra sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada dalam batas-batas kesamaan itu.

Dalam arti demikian, bangsa Indonesia adalah proyeksi ke depan dan sekaligus ke belakang. Karena itu tidak pernah dikatakan bangsa itu “lahir” melainkan ia “hadir” dalam formasi sebagai suatu *historical being* sebagaimana dikatakan komunitas-komunitas terbayang. Namun, pada sisi yang lain, ia juga menimbulkan dampak negatif, karena pada saat masyarakat Indonesia tidak saling mengenal sebagian besar anggota lain, tidak bertatap muka dengan mereka, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka justru seringkali menjadi pemicu timbulnya konflik antarkelompok masyarakat, yang pada gilirannya, konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*). Di sinilah perlunya dibangun politik *Bhinneka Tunggal Ika* yang memberikan tempat yang pantas pada keberagaman itu.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. (2002). *Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang)*. Yogyakarta: Kerjasama Insist dan Pustaka Pelajar.
- Arif, Dikdik Baehaqi. (2008). *Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap Kompetensi Kewarganegaraan*. Tesis SPs UPI: Tidak diterbitkan.
- Azra, Azyumardi. (2006). "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme". Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press.
- Dhakidae, Daniel. (2002). Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-Komunitas Terbayang. Pengantar dalam Anderson, Benedict. (2002). *Imagined Communities (Komunitas-komunitas Terbayang)*. Yogyakarta: Kerjasama Insist dan Pustaka Pelajar.
- Gonggong, Anhar. (2000). Hidup dan Sejahtera Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika: Pengantar untuk Memahami Diri. Prakata dalam Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Hardiman, F. B. (2002). Belajar dari Politik Multikulturalisme. Pengantar dalam Kymlicka. (2002). *Kewargaan Multikultur: Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas*. Terjemahan oleh Edlina Afmini Eddin dari judul *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority*. Jakarta: LP3ES.
- Hefner, Robert W. (2007). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli "The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia". Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Supardan, Dadang. (2008). "Peluang Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultur: Perspektif Pendidikan Kritis". *Alumni*, Vol 1 No. 2, Mei-Agustus 2008, 128-151.
- Suparlan, Parsudi. (2005). *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Sutarto, Ayu. (2011). "Pancasila Sebuah Pilihan Puncak dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Dalam *Prosiding Kongres Pancasila III "Harapan, Peluang, Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila"* yang diselenggarakan oleh MPR RI, Universitas Airlangga Surabaya, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 31 Mei – 1 Juni 2011 di Surabaya.
- Tantular, Mpu. (2009). *Kakawin Sutasoma*. Penerjemah: Dwi Woro Retno Mastuti dan Hastho Bramantyo.